

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, Zainal, 2020, *Hukum Kepailitan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Asikin, Zainal, dan Wira Pria Suhartanto, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Azizah Noor, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin
- Endah Pujiastuti, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang University Press, Semarang.
- Harahap, Arifuddin Muda, 2020, *Buku Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara, Malang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhamad Sadi Is, 2016, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Tyas, D.C. 2010, *Ketenagakerjaan Di Indonesia*, ALPRIN, Semarang.
- Wahyudi, Eko, 2019, *Pertanggungjawaban Hukum Mogok Kerja*. CV. Mitra Sumber Rejeki, Surabaya.
- Yuhelson. 2019, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo.

JURNAL

- Adya Bifa Wisnu Pradipta, Habibah, Nadira Nur, & Rakhman, Muhammad Rea Arif. “*Kerjasama Pembiayaan Pelelangan Kepailitan Antara Perbankan Bumh Dengan Kurator Negara Sebagai Inovasi Hukum Dalam Percepatan Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Masa Pandemi Covid-19*”. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 10, No 1, 2021, DOI : <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.641>
- Aprilianto Dio, dan Wijayanti Asri, “*Hak Pekerja Yang Diphk Karena Efisiensi Pada Masa Pandemi Covid Dan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*”, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 7, No 2, 2021.
- Arsis Ravi Dana, Iftitah Anik, Zainul Ichwan Muhammad, “*Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Pasca*

Pailit", Jurnal Supremasi, Vol 14, No 2, 2024.

Banjarnahor David, "*Implementasi Pembayaran Upah Pekerja Pada Perusahaan Yang Mengalami Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 124/K/Pdt.Sus/2011 Pada Kasus Pt. Istaka Karya)*", Tahkim, Vol 17, No 2, 2021, DOI : <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/thk.v17i2.2327>

Dewi, Ni Made Trisna, "*Upaya Hukum Yang Ditempuh Oleh Pekerja Apabila Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*" Jurnal Hukum Saraswati, Vol 2, No 2, 2020.

Faisal Saprudin, dan Yulia Qamariyanti, "*Kedudukan Pekerja Untuk Mendapatkan Hak Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit*", JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 3, 2023, DOI: <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.253444>

Hidayah Nurul, et al, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat Kepailitan Perusahaan*", Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM), Vol. 2, No. 1, 2024, DOI: <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i1.371>.

Hindrawan Prayogo, et al, "*Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*", Locus Journal of Academic Literature Review, Vol 2, No 8, 2023.

Hisbulloh Moh Hamzah, Wahyuni Rusliana Dwi, "*Deregulasi Hak Upah dan Pesangon Pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Konsep Omnibus Law*", Jurnal Studi Islam Dan Sosial, Vol 3, No 1, 2022, DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v3i1.121>

Irnawati, et al, "*Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Pemenuhan Ha Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia*", Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 9, 2024.

Janah, Ita Wardatul, "*Implikasi Kasasi Sebagai Upaya Hukum Terakhir Pada Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung)*", Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol 5, No 1, 2023, DOI: <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.3152>

Josviranto Mikael, "*Tinjauan Yuridis Perusahaan dalam Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*", Brilliant: Jurnal Riset Dan Konseptual, Vol 7, No 1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.28926/briliant.v7i1.895>

- Kartoningrat R Besse, Marzuki Peter, Hadi Subhan M, “*Prinsip Independensi dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit. RechtIdee*”, Vol 16, No 1, 2024.
- Kosasih Alin, dan Ansari, Teuku Sahrul, “*Ketidak Patuhan Perusahaan Dalam Membayar Pesangon*”, Vol 12, No 1, 2025.
- Listianingrum, Silfiana Arifati, “*Syarat Formil Perundingan Bipartit Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Putusan Nomor:10/Pdt.Sus-Phi/2018/ Pn.Dps. Jo. Putusan Nomor 392/K/Pdt.Sus-PHI/2019)* ”, Reformasi Hukum Trisakti, Vol 2, No 1, 2020, DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.10441>
- Luthvi Febryka Nola, “*Mafia Kepailitan Dalam Penjualan Harta Pailit (Kepailitan Mafia in Sales of Pailit Treasure)*”, Journal Kajian, Vol 23, No 3, 2020, DOI : <https://doi.org/10.22212/kajian.v23i3.1883>
- Mantili Rai, dan Dewi Trisna, “*Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan.*” Jurnal Akses, Vol. 12, No. 2, Desember 2020, DOI: <https://doi.org/10.47329/jurnalakses.v12i2.681>.
- Murtadho, Nashif. Ali, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Preferen dalam Pembersihan Proses Kepailitan.* Journal of Contemporary Law Studies”, Vol 2, No 3, 2024.
- Ningtyas Anisa Norma, Prihartono Agus, & Dwisvimiar Inge, “*Rehabilitasi Dan Pembubaran Perseroan Terbatas Sebagai Akibat Dari Putusan Pernyataan Pailit*”, ADIL : Jurnal Hukum, Vol 15, No 2, 2024.
- Nafs Az Zahra Tazkiatun dan Adnan Hamid Muhammad, “*Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Dalam Kepailitan.* Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan”, Vol 3, No 1, 2023.
- Oktaviani Diah, et al, “*Analisis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) secara Litigasi maupun Non-Litigasi*”, Rechtenstudent, Vol 4, No 2, 2024, DOI: <https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.249>
- Pebriansyah Yudi, et al, “*Sejarah Politik Hukum Indonesia Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja*”, Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat, Vol. 15, No. 1, 2024.
- Pratama Yodi, et al, “*Determinan Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang Dan Konsumsi*”, Jurnal Ekobistek, Vol. 11, No. 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.343>.

- Qodri Muhammad Syafri, “Kendala Implementasi Pemberian Pesangon Dalam Kondisi Perusahaan Yang Ditutup Terhadap Pekerja Yang Dikenakan Phk : Studi Kasus Putusan Nomor”, Vol 2, No 1, 2025.
- Ramadina, Ninda Putri, et al, *Tinjauan Yuridis “Kepailitan Studi Kasus PT. Kertas Leces pada Putusan Nomor 1/K/Pdt.Sus-Pailitan/2020”*, Jurnal Tana Mana, Vol 4, No 2, 2023, DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.354>
- Rudi Avianto, Endeh Suhartini, dan Achmad Jaka Santos Adiwijaya. “Perbandingan Sistem Hubungan Kerja PKWTT Dan PKWT Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja” Jurnal Ilmiah Living Law, Vol. 14, No. 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.6361>.
- Satria Hadi Wibowo, dan Matheus Juan, “Tinjauan Yuridis Pemberian Uang Pesangon Kepada Karyawan Yang Di-PHK Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja. NUSANTARA :Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial”, Vol 10, No 5, 2020, DOI: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i5.2023.2560-2565>
- Saputra Ilman Eka, “Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan”, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 23, No 2, 2020, DOI: <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.44>
- Sianturi Martunas, Iryani Dewi, dan Aji Hari Setiawan, Puguh, “Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan. Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan”, Vol 14, No 6, 2023, DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/covalue.v14i6.3945>
- Silalahi Rumelda, “Kajian Hukum Atas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Konsiliasi. Jurnal Darma Agung”, Vol 27, No 2, 2019, DOI: <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v27i2.276>
- Simanjuntak, Herry Aryo, “Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditor”, Justiqua, Vol 2, No 2, 2020, DOI: <http://portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojsystem/index.php/JUSTIQA/article/view/458>
- Simanjuntak Jimmy. “Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (Bumh Persero)”, Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, Vol. 10, No. 1, 2024, DOI: <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.338>.
- Situmorang Basani. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menghimpun Dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengertian Dan Sumber-Sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2010.

Sonyi Edy dan Manery Nugrah Gables. Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Pembagian Hutang Harta Pailit. *Pattimura legal Journal*. Vol 2. No 1. 2023. DOI: <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8373>.

Susanto Devi, Hasnati Hasnati, dan Fahmi Fahmi. “*Kewajiban Perusahaan Pailit Dalam Penyelesaian Hak-Hak Karyawan Ditinjau Dari Undang Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, *Qistie*, Vol. 13, No. 2, 2020, DOI: <https://doi.org/10.31942/jqi.v13i2.3912>.

Yanuarsi Susi, “*Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi*”, *Solusi*, Vol 18, No 2, 2020, DOI: <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.289>

Zakaria, Elsa Safira Chairani & Sulistiyantoro, “*Argumentasi Hukum Perubahan Kedudukan Dari Kreditur Konkuren Menjadi Kreditur Preferen Berdasarkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, *Journal of Social Community*, Vol 9, No 2, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023, Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar.

LAIN-LAIN

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 3 November 2024.

Harefa, Raja Basar Abraham Novanda “*Berapa Lama Proses Pemberesan Harta Pailit?*”, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-lama-proses-pemberesan-harta-pailit-lt67379c06443a6/>, diakses 19 Maret 2025

Ketenagakerjaan, K. (n.d.). “Jaminan Kehilangan Pekerjaan”, <https://youtu.be/neBmNVW6-1o?si=dnZgqCh-Ekvikyeq>, diakses 5 Maret 2025

Tempo, “Nasib Karyawan PT Kertas Leces Usai Resmi Bubar” <https://www.tempo.co/ekonomi/nasib-karyawan-pt-kertas-leces-usai-resmi-bubar-215657>, diakses 3 November 2024.